

BAB IV

KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KRISIS SURIAH

Negara *Great Power* yang terlibat dalam konflik Suriah yakni Amerika Serikat. AS sendiri sudah lama ikut terlibat pada konflik-konflik yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah. Bukan tanpa alasan AS melibatkan diri pada kekacauan yang terjadi di Timur Tengah. Selama ini AS selalu berada dibalik setiap kekacauan yang terjadi di beberapa negara sebelumnya seperti Tunisia, Libya, dan Mesir dan beberapa negara lainnya. Keterlibatan negeri *paman sam* berdasarkan atas kepentingan politik dan ekonominya. Sebagai negara *superpower*, AS menginginkan setiap negara di dunia untuk tunduk dan mengikuti keinginannya. Setelah keterlibatan AS dalam beberapa konflik yang terjadi di Timur Tengah kini negara adidaya tersebut dihadapkan pada konflik serupa yang terjadi di Suriah. Konflik yang terjadi atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pihak pemerintah yang berkuasa juga melanda Suriah, dimana sebelumnya terjadi di Tunisia, Libya, dan Mesir.

Suriah sendiri adalah negara yang sedang mengalami gejolak politik, dimana masyarakatnya menuntut mundur Presiden Bashar al-Assad. Tuntutan masyarakat Suriah dilatar belakangi oleh keberhasilan masyarakat Tunisia, Libya, dan Mesir yang berhasil menuntut mundur rezim otoriter di ketiga negara tersebut. Tuntutan ini merupakan akumulasi dari ketidakpuasan masyarakat Suriah terhadap pemerintahan Assad yang dianggap otoriter. Setelah serangkaian peristiwa yang

terjadi antara pihak oposisi masyarakat dan pihak pemerintahan Bashar al-Assad kini Suriah menjadi negara medan perang. Konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah sudah tidak lagi berbicara pertempuran antara kelompok oposisi masyarakat melawan pemerintahan Bashar al-Assad, akan tetapi konflik meluas dengan ikut bergabungnya dua kekuatan besar dunia yakni AS dan sekutunya serta Rusia dan sekutunya. Tidak hanya sampai disitu konflik Suriah juga dimeriahkan dengan kehadiran kelompok oposisi yakni *Islamic State of Iraq and Syria* yang ingin menghilangkan batas antara Irak dan Suriah dengan tujuan mendirikan negara Islam.

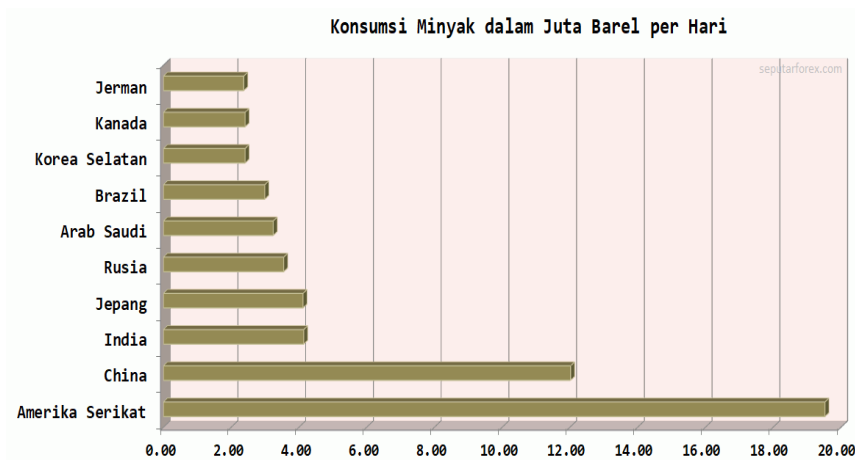
Setiap pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi di Suriah membawa kepentingannya masing-masing. Tidak terkecuali Amerika pada konflik Suriah Amerika Serikat juga mempunyai kepentingan serta tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut bisa dilihat pada bab sebelumnya terkait dengan kepentingan utama Amerika di Timur Tengah. Dalam kasus yang terjadi di Suriah Amerika memberikan dukungannya terhadap kelompok oposisi guna mencapai kepentingan nasional negaranya.

Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. H.J. Morgenthau menyatakan bahwa, kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara

menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik (Morgenthau H. J., 1951).

Kepentingan nasional Amerika dapat dilihat dari perumusan politik luar negerinya. Dalam konteks Timur Tengah, Amerika mempunyai beberapa poin kepentingan nasional yang dirumuskan dalam politik luar negerinya di Timur Tengah. Kepentingan ekonomi dan politik, kepentingan untuk mempertahankan eksistensi Israel, pemberantasan kelompok teroris untuk menjaga kedamaian dunia internasional, proses demokratisasi di Timur Tengah demi upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Berdasarkan kepentingan umum Amerika di Timur Tengah, penulis akan menerapkan beberapa poin kepentingan Amerika dalam melihat krisis yang terjadi di Suriah.

A. Kepentingan Ekonomi



Gambar 1.4 : Daftar Negara Pengonsumsi Minyak Terbesar Dunia

Sumber : Kompasiana

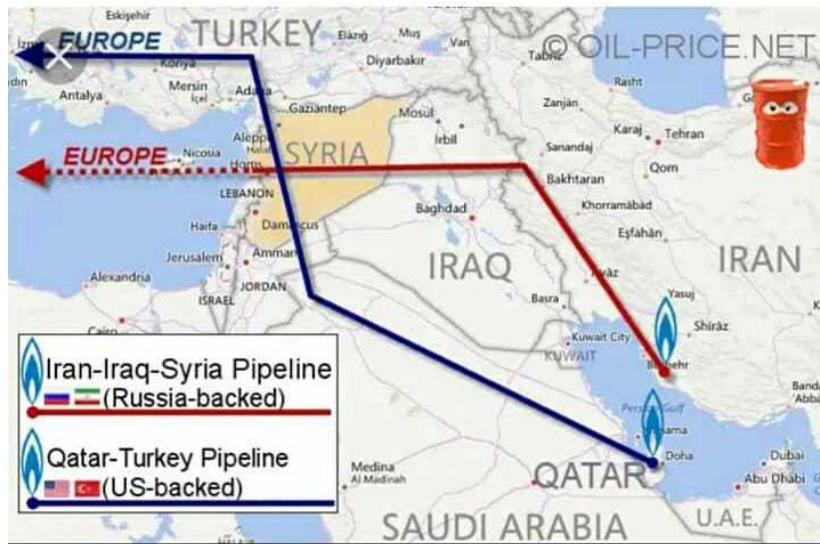
Salah satu kebijakan politik luar negeri AS di Timur Tengah yakni mempertahankan akses strategis untuk minyak sebagai konsumsi pribadi dan untuk kepentingan negara yang beraliansi dengan AS. Amerika sebagai negara kapitalis maju yang perekonomiannya berbasis pada sektor industri mengharuskannya menjadi pengonsumsi bahan bakar fosil terbesar dunia terutama minyak bumi dan gas. Konsumsi energi di seluruh dunia masih didominasi oleh negara industri besar seperti Amerika, Cina, Rusia dan Jepang. Amerika Serikat sendiri merupakan konsumen terbesar energy dunia yang mencapai 2.331,6 juta ton minyak atau memakan lebih dari 22,8% dari seluruh konsumsi energi dunia (Muttaqiena, 2018).

Sudah sejak lama AS fokus terhadap pemenuhan energi untuk kebutuhan dalam negerinya, hal ini tergambar dalam kepentingan AS terhadap minyak Timur Tengah yang tertulis dalam dokumen pada tahun 1944. Departemen Luar Negeri AS menggambarkan Semenanjung Arab sebagai berikut: “Suatu sumber besar bagi kekuasaan strategis dan hadiah material terbesar dalam sejarah dunia”. Dalam pandangannya AS menyadari bahwa kendali terhadap minyak di kawasan itu adalah sarana untuk mengendalikan dunia dan mempertahankan peradaban mereka (Widjdi, 2010).

Dalam kaitannya dengan Suriah, AS sebenarnya tidak secara langsung mempunyai kepentingan ekonomi terhadap cadangan minyak Suriah yang bisa dibilang kecil dibanding negara-negara Arab lain di kawasan Timur Tengah. Tetapi, Suriah bukan tentang berapa banyak cadangan minyak dan

gas yang bisa dikuasai AS. Lebih jauh lagi melihat keberadaan Suriah sebagai “jantung Timur Tengah” dimana anggapan bahwa jika dapat mengontrol Suriah maka akan mudah mengontrol jalur energi Timur Tengah. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, Suriah merupakan penghubung setiap daerah kaya minyak seperti Irak, Iran menuju laut mediterania yang dapat langsung dikirim ke pasar Eropa dan Amerika Serikat.

Jika dapat menguasai Suriah secara keseluruhan sama artinya dengan menguasai cadangan gas terbesar dunia yang baru saja ditemukan. Kalimat tersebut menunjukkan seberapa pentingnya peran Suriah dalam jalur pandangan di Timur Tengah. Hal itu bukan tanpa alasan, wilayah Suriah terdapat banyak jalur pipa minyak dan gas yang pendistribusiannya harus melalui Suriah. Selain itu, Suriah juga sudah lama menjadi tempat transit jalur perdagangan minyak di Timur Tengah. Hal tersebut dikarenakan lokasi Suriah yang strategis dan di dominsi oleh daratan landai yang luas sehingga akan sangat efektif sebagai jalur pipa gas ataupun pengiriman minyak bumi. Maka dari itu Amerika Serikat mendukung kelompok oposisi SNC dan SFA dengan tujuan bisa menanamkan pengaruhnya serta bisa memonopoli jalur pandangan Timur Tengah yang melewati Suriah.



Gambar 1.5: Jalur Perdagangan Minyak dan Gas Timur Tengah

Sumber : Kompasiana

Dukungan AS terhadap kelompok oposisi benar-benar bermotif kepentingan ekonomi. Hal itu dapat dibuktikan ketika konflik semakin meruncing ada indikasi bahwa kelompok-kelompok oposisi dukungan AS berupaya menyerang fasilitas-fasilitas energi Suriah seperti pipa gas dan minyak. Seperti yang terjadi di kota Homs, dimana sekelompok pemberontak meledakan pipa minyak dari timur Suriah yang menuju kilang minyak kota Homs.

Hal tersebut sejalan dengan politik luar negeri Amerika Serikat yakni mempertahankan akses strategis untuk minyak dan membeli klien negara. kedua hal ini merupakan kepentingan nasional Amerika yang dicetuskan melalui politik luar negerinya di Timur Tengah. dalam konflik Suriah,

dijelaskan sebelumnya bahwa Suriah merupakan wilayah jalur pipa gas dan minyak serta pelabuhan tempat transit kapal-kapal angkutan minyak yang akan dikirim ke pasar Amerika dan Eropa. Amerika berupaya menguasai kedua faktor tersebut demi mewujudkan tercapainya kepentingan nasional negaranya dalam hal kepentingan ekonomi.

B. Kepentingan Politik

Selain kepentingan ekonomi kepentingan politik juga menjadi tujuan utama Amerika terlibat dan mendukung kelompok oposisi pada konflik Suriah. SNC dan FSA dipandang sebagai kelompok yang potensial bagi AS sebagai alat untuk menanamkan pengaruhnya di Suriah. Sehingga, AS bisa dengan mudah mencapai kepentingan lainnya di Suriah. Dari sekian banyak kepentingan yang bisa dicapai AS dengan berkejarannya Suriah, terdapat dua kepentingan yang menjadi prioritas AS di Suriah yaitu kepentingan politik dan ekonomi. Kepentingan utama yang ingin dicapai oleh AS dengan mendukung SNC dan FSA adalah untuk dapat menggulingkan rezim Assad. Dimana hal ini merupakan langkah atau seperangkat tindakan yang dilakukan AS untuk memperoleh pengaruh di Suriah.

Mengapa kemudian yang didukung oleh AS adalah SNC dan FSA, hal ini cukup beralasan karena dari pandangan AS keduanya dianggap sebagai kelompok yang berpotensi besar untuk mempengaruhi kondisi perpolitikan Suriah. Hal tersebut dikarenakan mereka merupakan bagian internal dari negara Suriah yang telah memiliki kelembagaan yang lebih terorganisir

dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang ada. Serta, kedua kelompok ini membuka peluang untuk keterlibatan asing di Suriah karena sebagian besar anggota SNC juga berdomisili di luar Suriah, sehingga dilihat dari sudut pandang internasional keduanya tidak dapat dinilai sebagai kelompok ekstrimis ataupun digolongkan sebagai teroris yang nantinya dapat membahayakan kepentingan dan agenda AS dan Eropa di Suriah.

Sikap AS yang mendukung kedua kelompok ini berdasarkan pemikiran bahwa unsur yang paling dapat mempengaruhi kondisi suatu negara adalah warga negaranya sendiri. Dimana warga negara dapat mempengaruhi arah kebijakan atau keberlangsungan rezim yang ada di negaranya, dan pengaruh bisa lebih kuat jika setiap kelompok bersatu dalam kekuatan kolektif. Maka dari itu, kemudian SNC dan FSA beraliansi sesuai dorongan AS, Prancis, negara-negara Arab, dan negara Eropa lainnya. Ketika konflik baru beberapa bulan berlangsung SNC yang diakui oleh AS dan sekutunya sebagai perwakilan resmi atau kelompok oposisi sah di Suriah pernah menghimbau dunia internasional untuk segera melakukan intervensi. SNC menyerukan untuk dilakukannya intervensi militer oleh PBB ke Suriah (Sulaeman, 2013).

Pilihan AS untuk mendukung NSC dan FSA merupakan perwujudan politik luar negeri AS yang dapat dikatakan sebagai suatu tindakan untuk menanamkan pengaruh di Suriah. Demi untuk mendukung tindakan tersebut diperlukan kemampuan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan,

dalam hal ini AS memiliki kemampuan untuk memobilisasi semua sumber daya yang ada. AS secara internasional merupakan kekuatan besar yang memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mendukung kelompok oposisi baik berupa senjata, amunisi, kendaraan tempur, serta segala perlengkapan perang canggih yang dapat disalurkan ke FSA untuk mengimbangi kemajuan persenjataan yang dimiliki militer Bashar al-Assad yang dipasok oleh Iran dan Suriah.

Singkatnya, SNC dan FSA merupakan instrumen yang digunakan AS demi mencapai kepentingan politik dan sebagai jalan agar agenda politik luar negeri AS bisa tercapai di Suriah. Selain itu, tujuan yang relatif tetap dari setiap kebijakan yang diambil AS terkait Timur Tengah adalah ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya bahan mentah, dan dari segi keamanan adalah membendung pengaruh Iran serta mengantisipasi kekuatan-kekuatan yang dapat membahayakan keberlangsungan negara Israel.

C. Kepentingan Keamanan

Ancaman pada konteks dunia Internasional dewasa ini, tidak lagi membicarakan perang antara negara seperti yang terjadi pada Perang Dunia I, II dan Perang Dingin. Bagi negara besar seperti Amerika Serikat bentuk ancaman dunia memasuki *fase* baru. Lahirnya kelompok-kelompok ekstrimis dan radikal merubah pandangan dunia internasional bahwa sesuatu yang perlu diwaspadai bukan lagi hanya sekedar negara tapi juga kelompok masyarakat yang mempunyai paham yang bisa meruntuhkan eksistensi negara. Amerika

menyebut ancaman tersebut sebagai ancaman dari kelompok teroris yang harus dimusnahkan demi menjaga kedamaian dunia internasional.

Dalam mempertankan keamanan nasional negara masing-masing, setiap negara berupaya mengantisipasi ancaman tersebut dengan mengembangkan kekuatan militer dan sistem keamanan dan pertahanan negara. Selama ini Amerika dikenal sebagai negara yang mempunyai sistem peralatan alusista yang canggih, agen khusus seperti FBI dan CIA, serta pertahanan di dalam negara yang mempuni menempatkan Amerika sebagai negara yang kebal terhadap segala bentuk ancaman. Tetapi, pada kenyataanya kelompok ancaman baru teroris menyerang dan meruntuhkan salah satu gedung yang merupakan simbol kehebatan Amerika dalam bidang ekonomi. Tragedi 9/11 membuat setiap aktor negara beranggapan bahwa ancaman bisa datang dari mana saja. Atas kejadian tersebut Amerika menjadi negara terdepan dalam pemberantasan teroris demi mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia internasional.

1. Perang Melawan Teroris

Selama perang dingin AS dan Soviet menjadi kekuatan utama dunia yang saling menghancurkan demi mencapai posisi tertinggi. Namun, setelah runtuhnya kekuatan komunis AS muncul sebagai kekuatan unipolar di dunia yang bertahan sampai sekarang. Kejayaan AS setelah negara yang dianggap tidak tertembus oleh kekuatan luar mendapat serangan yang merobohkan gedung monumental WTC dan Pentagon pada 11 September 2001. Kejadian

yang terjadi di WTC disebut sebagai ulah tentara jihadis Islam sehingga menjadikan Islam sebagai ancaman bagi AS pada saat itu. Hal tersebut disebabkan pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut merupakan Osama bin Laden yang dianggap AS sebagai ketua kelompok teroris (Aden, 2011).

Sejak peristiwa 9/11, AS segera mengatur kebijakan politik luar negerinya yang fokus pada upaya pemberantasan jaringan terorisme dan menyerukan perang di beberapa negara seperti Afghanistan dan Irak yang dianggap sebagai markas bagi kelompok teroris. Melihat kawasan Timur Tengah yang mayoritas negara dipimpin oleh kekuasaan tangan besi, AS menganggap hal tersebut merupakan penyebab lahirnya gerakan-gerakan islam ekstremis atau terorisme serta paham radikal anti-Barat. Berdasarkan alasan tersebut AS menghimbau diperlukannya perubahan sistem di Timur Tengah perlu adanya reformasi ke arah demokrasi di kawasan tersebut. Demi upaya tersebut AS mendukung demokratisasi, sistem perekonomian pasar bebas, dan HAM yang menjadi elemen moral bagi politik luar negeri AS (Aden, 2011).

Berdasarkan salah satu dari elemen politik luar negeri yang diterapkan oleh Amerika Serikat yakni *peace*, Amerika tidak akan tinggal diam jika terdapat ancaman dari pihak asing yang dianggap menghalangi kepentingan nasional negaranya. Demi mewujudkan perdamaian, Amerika memposisikan diri sebagai penjaga keamanan dunia. Gerakan ekstrimis teroris dianggap oleh

Amerika sebagai bentuk ancaman baru dunia internasional dewasa ini yang perlu dilenyapkan. Konflik yang terjadi di Suriah yang juga melibatkan kelompok teroris Al-Qaeda dan ISIS memberikan kesempatan bagi Amerika untuk melenyapkan kelompok tersebut dan membawa perdamaian pada dunia internasional. dimana hal tersebut sejalan dengan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah yakni perang melawan teroris.

Berlanjut ke era Presiden Barack Obama, AS masih mempertahankan adanya demokratisasi di Timur Tengah. Hal tersebut sesuai dengan pidatonya pada Mei 2011 mengenai situasi yang berkembang di Timur Tengah dan Afrika Utara, Presiden Obama menyebutkan bahwa mempromosikan reformasi dan mendukung transisi ke demokrasi merupakan kebijakan AS di kawasan tersebut, seperti yang disampaikan Obama *“it will be the policy of the United States to promote reform across the region, and to support transitions to democracy”* (OBAMA, 2011).

Program demokratisasi yang dijalankan oleh AS di Timur Tengah dalam rangka untuk mempromosikan demokrasi ala Amerika bagi negara Arab. Namun, tujuan lain AS dalam program demokratisasi saling berkaitan dengan upaya untuk menyebarkan paham demokrasinya sekaligus cara agar negara-negara Timur Tengah dapat didikte agar kepentingan pribadinya akan sumber daya alam serta ancaman terorisme dapat dihilangkan. Tidak lupa juga untuk mempertahankan kepentingan negara sekutunya yakni Israel, dengan menjadikan negara di Timur Tengah sebagai negara demokrasi maka posisi

Israel di Timur Tengah menjadi sangat aman. Hal yang sama coba untuk diterapkan AS pada negara yang sedang berkecamuk yakni Suriah.

Rezim Bashar al-Assad telah membungkam kebebasan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan di Suriah. Pelanggaran HAM dan pembantaian warga sipil oleh Assad menjadi perhatian dunia. Fenomena *Arab Spring* yang terjadi di beberapa negara menjadi model baru bagi AS dalam menanamkan nilai-nilai demokrasinya. AS meyakini bahwa sistem demokrasi dapat menjamin setiap peristiwa kenegaraan serta perkembangan sebuah negara di bawah demokrasi dapat diarahkan sesuai kepentingan dan keinginan masyarakat. Demokrasi juga menyediakan lingkungan dimana perlindungan terhadap hak warga negara, serta demokrasi juga menawarkan perdamaian dan stabilitas dalam hubungan internasional (Phillips, 2012).

Semakin banyaknya pihak luar yang ikut terlibat pada konflik Suriah seperti kelompok Al-Qaeda dan ISIS, maka AS semakin mendorong kelompok oposisi SNC dan FSA untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Assad. AS menginginkan adanya perubahan sistem di Suriah dari sistem otoriter ke arah demokrasi yang merupakan desakan terhadap pemerintahan Bashar al-Assad. Upaya AS dalam mendesak pemerintahan agar bisa menjamin kebebasan warga sipil yang sebelumnya menjadi korban selama konflik di Suriah dimulai.

Jika upaya AS berhasil menjadikan Suriah sebagai negara demokratis, maka secara tidak langsung sistem politik dan ekonomi di Suriah juga akan

ikut berubah, yaitu ke arah ekonomi liberal. Pada akhirnya Suriah akan menjadi negara demokratis sesuai dengan yang diharapkan AS, bukan negara demokrasi yang selama ini diinginkan oleh masyarakat Suriah. Walaupun desakan oleh pihak AS terhadap negara yang dianggap melahirkan kelompok-kelompok ekstrimis harus berubah haluan ke arah demokratis akan tetapi, Suriah selalu mendapatkan dukunga dari negara besar lainnya seperti Rusia dan Cina yang merupakan lawan AS dalam kontestasi dunia internasional.

2. Mempertahankan Eksistensi Israel

Kepentingan berikutnya Amerika yakni mempertahankan dan melindungi eksistensi Israel di Timur Tengah. Faktanya, mempertahankan kepentingan Israel merupakan tindakan yang sudah lama dilakukan oleh Amerika. Sejak terbentuknya Israel dan mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948, Amerika bersama dengan Inggris merupakan dua negara besar yang menjadi pelopor terbentuknya negara Israel melalui *Deklarasi Balfour*.

Perjanjian rahasia ini dibuat antara pemerintah Inggris dan tokoh masyarakat Zionis dengan tujuan mendirikan “Rumah Nasional” bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Sebelum di umumkan *Deklarasi Balfour*, pemerintah Inggris berusaha membujuk Presiden Woodrow Wilson untuk mendukung deklarasi tersebut. Awalnya Wilson menolak memberikan dukungannya terhadap rencana Inggris dan tokoh masyarakat Zionis tersebut. Amerika beranggapan bahwa dukungan tersebut nantinya akan memperkeruh

hubungan antara Amerika dan Dunia Arab. Melalui desakan salah satu tokoh Yahudi di Amerika yakni Louis D. Brandeis, pada akhirnya Amerika menyetujui dan mendukung terbentuknya negara Israel di tanah Palestina.

Banyaknya tokoh Zionis berpengaruh yang menetap di Amerika membuat hubungan Amerika dan Israel semakin dalam. Kehebatan para tokoh Zionis dalam mempengaruhi kebijakan Amerika terhadap kepentingan negara Israel dikenal dengan lobi Yahudi (*Jewish Lobby*). Tercatat, dari jumlah penduduk Amerika terdapat 2 persen penduduk Yahudi yang bermukim di Amerika atau sekitar 6 juta jiwa (Weir, 2017).

Pada krisis yang terjadi di Suriah kali ini, walaupun Israel tidak terlibat langsung pada konflik tersebut akan tetapi Amerika melihat ancaman terhadap Israel. Berdasarkan faktor sejarah Israel dan Suriah pernah bersitegang karena tuntutan Hafez al-Assad kepada untuk mengembalikan wilayah Daratan Tinggi Golan maupun hak-hak bangsa Arab yang lain. Tidak harmonisnya hubungan Amerika dan Suriah di masa Hafez dan Bashar secara tidak langsung membuat kepentingan dan keamanan Israel di Timur Tengah juga ikut terancam. Demi upaya menjaga eksistensi Israel dan meminimalisir segala bentuk ancaman Amerika terlibat dalam konflik Suriah demi upaya mencapai salah satu kepentingan nasional negaranya yakni mempertahankan eksistensi Israel.